



Yogya Ngebet Bangun Hotel

■ Moratorium Tidak Diperpanjang



Pada 2019 kami akan membuka izin mendirikan hotel, tapi sangat terbatas. Terutama membuka untuk bintang empat dan bintang lima, serta guest house.

YOGYA, TRIBUN - Masa moratorium hotel berakhir. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun membuka kembali izin pembangunan hotel. Izin terbatas untuk hotel bintang empat, bintang lima, dan *guest house* atau *homestay*.

Kebijakan tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pemba-

ngunan Hotel.

Membuka kembali izin pembangunan hotel ini untuk merespons New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang bakal beroperasi perdana pada 2019.

NYIA memiliki potensi besar untuk mendorong tingkat kunjungan wisatawan ke Yogyakarta.

● ke halaman 7

LAYANAN PENGINAPAN

JUMLAH TOTAL HOTEL DI YOGYAKARTA : 624 UNIT

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ● HOTEL BINTANG LIMA : 4 UNIT | ● MELATI 3 : 29 HOTEL |
| ● HOTEL BINTANG EMPAT : 14 UNIT | ● MELATI 2 : 43 HOTEL |
| ● HOTEL BINTANG TIGA : 30 UNIT | ● MELATI 3 : 314 HOTEL |
| ● HOTEL BINTANG DUA : 19 UNIT | ● LOSMEN : 152 UNIT |
| ● HOTEL BINTANG SATU : 19 HOTEL | |

Mulai 2019 : Pemkot Yogyakarta membuka kembali izin pembangunan hotel bintang empat, hotel bintang lima, dan *homestay* atau *guest house*.

Heroe Poerwadi
Wakil Wali Kota
Yogyakarta

Jika Bandara Adisutjipto saat ini bisa membawa 7.000 hingga 8.000 penumpang per hari, maka NYIA bisa membawa 15 ribu hingga 25 ribu penumpang per hari. Dengan menambah hotel, maka Yogyakarta berharap bisa menampung pengunjung lebih banyak.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan, saat ini total hotel maupun penginapan di Yogyakarta yang terdata berjumlah 624 unit.

Jumlah tersebut terdiri hotel bintang lima (4 hotel), bintang empat (14 hotel), bintang tiga (30 hotel), bintang dua (19 hotel), bintang satu (19 hotel), Melati 3 (29 hotel), Melati 2 (43 hotel), Melati 3 (314 hotel), dan losmen 152 buah.

"Semua itu memiliki kapasitas 14-20 ribu. Sementara saat liburan Natal dan tahun baru kemarin, semua hotel penuh. Bahkan, saya dengan ajudan menemukan wisatawan yang menumpang lima hingga enam mobil harus ngingap di SPBU. Artinya, pada hari libur, Yogya sampai menolak tamu," katanya dalam jumpa pers mengenai penghapusan moratorium hotel di Ruang Sadewa Balai Kota Yogyakarta, Rabu (2/1).

Pertimbangan mengizinkan pembangunan hotel bintang empat dan bintang lima, yakni standar yang diperlukan terkait lahan harus luas. Maka, secara otomatis akan mengurangi jumlah orang yang mau berinvestasi. "Kami berharap hotel bintang empat dan

hotel bintang lima mampu menampung jumlah kamar lebih banyak," katanya.

Heroe menuturkan, hotel baru nantinya wajib mengambil air dari PDAM, tidak lagi ada sumur dalam. Sejalan ini, PDAM telah melayani 156 hotel. Data eksisting air baku PDAM yakni 550 liter per detik. Saat ini sedang dilakukan upaya memperbaiki pipa sepanjang 6.429 meter yang melewati jalur strategis.

"Tahun ini kita akan membangun jaringan pipa, diprioritaskan melayani hotel. Selain terkait PDAM, syarat lain yang harus dipenuhi adalah mendapatkan rekomendasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)," ujarnya.

Heroe juga menyinggung soal pengajuan izin pembangunan hotel, dimana sebelum moratorium pada 2013-2018, IMB yang sudah terbit sebanyak 88, dan IMB yang belum terbit 16.

"Ada 104 proposal yang ingin mendirikan hotel pada 2018. Dari 88 yang dapat IMB, ada 61 selesai membangun, ada 16 proses membangun, dan ada 11 yang belum membangun dan sudah dicabut. Dari 88, sebagian investor luar, tapi sebagian besar investor dalam," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Heri Karyawan, menjelaskan, ketika izin keluar namun pemohon melebihi batasan waktu untuk membangun, maka izin dicabut.

"Kalau mau bangun lagi harus mengajukan izin dari awal, dan sekarang syaratnya harus bintang empat atau bintang lima. Kalau

kembali seperti dulu nggak bisa," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengeluarkan 88 izin. Pada 2018 ada 103 proposal masuk, meskipun data awal menyebut 104, namun telah dicabut 1 karena pemohon tak mampu secara finansial.

"Tersisa 15 pemohon ini kami berikan waktu asal bisa memenuhi syarat. Ini tidak akan kena Perwal yang baru. Tapi saya yakin mereka tidak mampu mengurus lagi, banyak permasalahan. Misalkan sertifikat belum klop karena ada yang tak punya lahan sendiri, ada perebutan sampai sekarang tidak teralisasi," tandasnya.

Harus penuhi persyaratan

Sementara itu, Ketua PHRI DIY, Istijab, menjelaskan, syarat menjadi hotel bintang empat dan bintang lima diukur dari luasan serta berbagai macam sarana prasarannya.

Kalau bintang empat luasan tiap kamar 24 meter persegi. Sementara bintang lima luasan tiap kamar 28 meter persegi. Parkir juga minimal menampung 4 persen dari jumlah kamar yang ada.

Adapun syarat yang harus dipenuhi hotel sebagai bintang empat, selain yang disebutkan di atas, adalah memiliki jumlah kamar standar minimal 50 kamar dan 3 kamar *suite*.

Kamar mandi dalam dilengkapi instalasi air panas dan dingin, lobi luas minimal 100 meter persegi, memiliki sarana rekreasi dan olahraga, dan sebagainya.

Untuk menjadi hotel bintang lima, maka sebuah hotel harus memiliki jumlah kamar standar minimal 100 kamar dan 3 kamar *suite*.

Tempat tidur dan perabotan di kamar memiliki kualitas terbaik, terdapat layanan restoran antarkamar 1x24 jam selama seminggu penuh, terdapat pusat kebugaran, dan sebagainya.

"Harus ada sarana olahraga misalkan fitness atau renang atau tenis. Kalau nggak memenuhi persyaratan, maka sertifikat tidak akan keluar," bebernya.

Keberadaan hotel bintang empat dan hotel bintang lima di Kota Yogyakarta tersebut diharapkan mampu mendorong target 800 ribu wisatawan domestik yang datang ke Yogyakarta pada 2019.

Menurut Istijab, hotel bintang empat dan hotel bintang lima punya jaringan dan canggih. Mereka juga sudah merambah *online*. Harapannya, nanti bisa jadi mitra pemerintah.

Sudah ada 20 hotel yang telah membina desa wisata, sehingga mereka bisa baik lagi dalam melayani wisatawan. Misalkan tentang kebersihan, penyediaan toilet yang harus toilet duduk, dan sebagainya.

Disinggung mengenai potensi akuisisi hotel di bawah bintang empat, Istijab menjelaskan bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat luasan lahan di Yogyakarta untuk mendirikan hotel bintang empat dan bintang lima sangat terbatas.

"Beberapa hotel non-bintang mati, bisa diakuisisi dan dikembangkan jadi hotel bintang empat dan bintang lima. Ada juga beberapa hotel dibangun, tapi kurang pendanaan, bisa dibeli. Akuisisi nanti harus mengurus perizinan baru," bebernya. (kur)

Lebih Bijaksana Maksimalkan Homestay

AKTIVIS gerakan sosial Warga Berdaya, Elanto Wijoyono, meminta kebijakan membuka kembali izin hotel disertai penyampaian kajian secara terbuka dan terperinci kepada publik. Selama ini, Pemkot Yogyakarta kurang terbuka dalam hal kajian terkait pembangunan hotel, terutama kajian dampak lingkungannya.

Keterbukaan kajian pembangunan hotel dan dampak lingkungannya sangat penting untuk memberi gambaran riil kepada masyarakat. Dengan demikian, publik bisa ikut menilai, demi meningkatkan *trust* kepada pe-

● ke halaman 7

Lebih Bijaksana

● Sambungan Hal 1

merintah.

Menurut Elanto, akan lebih bijaksana seandainya pemerintah hanya memaksimalkan *guest house* atau *homestay*. Tidak perlu menambah bangunan hotel.

"Penambahan hotel belum *urgent*. Peralunya, kenaikan kebutuhan hotel hanya terjadi ketika musim liburan. *Guest house* dan *homestay* bisa jadi solusi ketika terjadi lonjakan pengunjung saat musim liburan. Artinya, wisa-

tawan tetap bisa *stay* di Yogyakarta tanpa inap di hotel," kata Elanto.

Terpisah, Bambang Anjar Jalurti selaku Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta secara terbuka menolak dicabutnya moratorium hotel. Peralunya, kebijakan tersebut terkesan hanya berorientasi pada peningkatan PAD. Hal ini terlihat dari tanpa disiapkannya instrumen-instrumen pendukung kebijakan ini.

Misalnya, kajian-kajian tentang pengembangan kota termasuk terkait tata ruang dan konsep pembangunan pariwisata di wilayah Yogya-

karta. Oleh karenanya, dikhawatirkan ada efek negatif terhadap kondisi sosiologis kepada masyarakat dan juga citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya akan semakin hilang.

"Yogyakarta juga hanya akan menjadi kota yang berkembang tanpa ruh. Akhirnya, masyarakat juga yang akan dirugikan. Kami meminta pemerintah betul-betul bisa mendasari kebijakan yang dilakukan dengan dasar kajian matang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata Bambang. (sus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005